



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

9 Desember 2014

Kepada

- Yth. 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
3. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
4. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
DKI Jakarta
7. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Provinsi
DKI Jakarta
10. Para Kepala Suku Dinas/Kantor/Satuan Polisi
Pamong Praja Kota/Kabupaten Provinsi DKI
Jakarta
11. Para Direktur RSUD Provinsi DKI Jakarta
12. Direktur RSKD Provinsi DKI Jakarta
13. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
14. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
15. Para Kepala Puskesmas Provinsi DKI Jakarta
16. Para Kepala UPT Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 55/SE/2014

TENTANG

**PENYAMPAIAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD/UKPD)
TAHUN ANGGARAN 2015**

Dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2015, perlu disusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD/UKPD. Untuk menyusun RKA dimaksud, bersama ini disampaikan Plafon Anggaran Sementara SKPD/UKPD dan RKA yang sudah dibahas oleh TAPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Surat Edaran ini. Selanjutnya diminta kepada Saudara untuk melakukan input Komponen RKA yang dapat diinput melalui Sistem e-Budgeting dengan alamat ebudgetingdki.net sesuai Pedoman Penyusunan Input Komponen RKA sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Surat Edaran ini.

Edaran ini agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Sekretaris Daerah,



Saefullah

NIP. 196402111984031002

Temabusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
Provinsi DKI Jakarta

Lampiran II : Surat Edaran Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 55/SE/2014
Tanggal 9 Desember 2014

PEDOMAN PENYUSUNAN INPUT KOMPONEN RKA

1. Plafon belanja dalam Surat Edaran ini hanya untuk Belanja Langsung (BL), Plafon Belanja Tidak Langsung (BTL) akan disampaikan lebih lanjut setelah ada hasil konfirmasi dengan SKPD/UKPD.
2. Dengan dilakukannya efisiensi jumlah kegiatan dan penggabungan kegiatan, maka :
 - a. Kegiatan dan anggaran sebagaimana lampiran I sudah diinput dalam e-budgeting.
 - b. Khusus kegiatan dan anggaran penyelenggaraan Operasional Kantor merupakan anggaran untuk kebutuhan :
 - Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK);
 - Penyediaan cetakan umum, penggandaan dan fotokopi;
 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana kerja;
 - Pembinaan rohani dan jasmani;
 - Penyediaan makanan dan minuman rapat;
 - Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor; dan
 - Penyediaan biaya transport kegiatan/rapat dinas di luar kantor dalam Provinsi dan uang lembur di luar jam kantor.
 - c. SKPD/UKPD agar melakukan input :
 - Volume dan satuan untuk masing-masing kegiatan; dan
 - Komponen belanja.
 - d. Penjelasan lebih lanjut dapat berkoordinasi dengan Bappeda/Kanppeko/Kanppekab sesuai dengan lingkup koordinasi SKPD/UKPD yang bersangkutan.
3. Terkait dengan ditingkatkannya Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) PNS yang berbasis kinerja individu berdasarkan merit point-reward and punishment, maka :
 - a. Anggaran untuk honorarium dilarang dianggarkan, kecuali untuk :
 - Tenaga ahli/Instruktur/Narasumber/Pendamping; dan
 - Pegawai Non PNS.
 - b. Anggaran untuk Biaya Pengendalian Teknis dilarang dianggarkan.
4. Berkenaan dengan terbitnya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembatasan Kegiatan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor dan sesuai arahan Gubernur tentang peningkatan efisiensi anggaran perjalanan dinas dan pembatasan pemberian izin perjalanan dinas baik dari sisi urgensi, jumlah peserta maupun jumlah hari maka :
 - a. Anggaran untuk Perjalanan Dinas Luar Negeri hanya boleh dianggarkan di SKPD;
 - b. Anggaran untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri hanya boleh dianggarkan di SKPD dan Walikota/Bupati, tidak diperkenankan di UKPD; dan
 - c. Melarang kegiatan pertemuan atau rapat dilaksanakan di hotel atau sejenisnya dengan memaksimalkan penggunaan ruang rapat kantor.

5. Dalam rangka upaya percepatan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa, maka :
 - a. SKPD/UKPD semaksimal mungkin melakukan pengadaan barang dan jasa secara swakelola, kontrak perorangan dan/atau melalui e-purchasing/e-katalog;
 - b. SKPD/UKPD segera mengusulkan dan menyempurnakan e-katalog dan komponen e-budgeting; dan
 - c. SKPD/UKPD segera mengusulkan kegiatan pemeliharaan, operasional, TALI-IPAL, gaji dan tunjangan, honorarium Non PNS, makanan panti, makanan hewan, obat-obatan, yang sifatnya terus menerus dan tidak boleh terputus melalui anggaran mendahului penetapan APBD.
6. Untukantisipasi kenaikan tarif dan kekurangan anggaran Telepon, Air, Listrik, Internet (TALI) dan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL), maka harus dianggarkan untuk memenuhi kebutuhan selama 12 (dua belas) bulan.
7. Terkait dengan pelayanan masyarakat untuk kebersihan, penerangan jalan dan sarana umum, alokasi untuk pembayaran tipping fee dan rekening listrik harus dianggarkan untuk 12 (dua belas) bulan.



Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Setaris Daerah,

Saefullah

196402111984031002

Lampiran I: Surat Edaran Gubernur Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta
Nomor : 55/SE/2014
Tanggal : 9 Desember 2014

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA DAN RKA SKPD/UKPD TAHUN 2015

Nama SKPD/UKPD : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN
Kode SKPD/UKPD : 1.25.001

BELANJA LANGSUNG SKPD/UKPD TAHUN 2015		Rp.	286.482.039.005
Terdiri dari :			
A	Penyelenggaraan Operasional Kantor Dinas Informatika dan Kehumasan	Rp.	3.343.558.000
1	Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK)		
2	Penyediaan Cetakan Umum dan Penggandaan		
3	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Kerja		
4	Pembinaan Rohani dan Jasmani		
5	Penyediaan Makan dan Minum Rapat		
6	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor		
7	Penyediaan Biaya Transport Kegiatan/Rapat Dinas diluar Kantor dalam Provinsi dan Uang Lembur diluar Jam Kantor		
B	Penyediaan Jasa TALI dan IPAL (12 Bulan)	Rp.	168.985.000
C	Penyediaan BBM dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Kantor	Rp.	350.000.000
D	Petugas Pelaksana Operasional Kantor	Rp.	300.000.000
E	Pembayaran Sewa Sarana Informatika	Rp.	34.354.000.000
1	Sewa Perangkat Lunak Mainframe Dan Dukungan Pemeliharaan		
2	Sewa Link Jaringan Komunikasi WAN dan Bandwidth Internet		
3	Sewa Bandwidth Internet untuk Publik		
F	Pembayaran Lisensi Email Lotus Note	Rp.	1.500.000.000
G	Pembayaran ATS (Annual Fee) Oracle	Rp.	1.500.000.000
H	Pembayaran Sewa DRC	Rp.	5.624.100.000
I	Pembayaran Lisensi Anti Virus	Rp.	700.000.000
J	Pengadaan software intelegent security system	Rp.	5.500.000.000
K	Pengadaan dan Pemeliharaan Perangkat Keras kebutuhan PTSP	Rp.	374.590.000
1	Pengadaan Komputer PC Kebutuhan PTSP		
2	Pengadaan Scanner Kebutuhan PTSP		
3	Pengadaan Printer Kebutuhan PTSP		
4	Pemeliharaan PC Kebutuhan PTSP		
5	Pemeliharaan Printer Kebutuhan PTSP		
L	Pengadaan Interkoneksi Jaringan Intranet	Rp.	15.000.000.000
M	Pengadaan Sarana dan Prasarana Telekomunikasi	Rp.	84.470.000.000
N	Pengadaan Software Interkoneksi Pemprov DKI Jakarta	Rp.	8.000.000.000
O	Implementasi Pergub No.39 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)	Rp.	1.000.000.000
P	Produksi dan Sosialisasi Materi Dokumentasi Audio Visual Melalui Aplikasi di Mobile Phone	Rp.	845.322.000
Q	Pemeliharaan Mainframe	Rp.	7.855.000.000
R	Pemeliharaan RCU, LCU, dumb Terminal dan Suku Cadangnya	Rp.	437.000.000
S	Pemeliharaan Peralatan Pendukung TI	Rp.	447.440.000
T	Pengelolaan Server	Rp.	8.788.080.065

U	Pemeliharaan / Perawatan / Penggantian Suku Cadang Sarana dan Prasarana Telekomunikasi	Rp.	5.295.000.000
V	Pengelolaan Data Center dan Perangkat Jaringan	Rp.	12.753.000.000
1	Pengelolaan Data Center (DC)		
2	Pengelolaan Perangkat Jaringan		
3	Update dan Rekonfigurasi Jaringan		
4	Tuning Relation database management system (RDBMS)		
W	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Informatika	Rp.	19.092.880.510
1	Pengelolaan dan Perbaikan Perangkat Walldisplay Recording System Monitoring Berita TV		
2	Pengkayaan Database Audio Visual Kehumasan Pemprov. DKI Jakarta		
3	Penyiapan Materi dan Dokumentasi Kehumasan Pemprov DKI Jakarta		
4	Advertorial dan Sponsor Artikel di Media Cetak Harian, Majalah, Media Online dan televisi		
5	Penyebarluasan Informasi Melalui PSA dan Running Text di Televisi		
6	Kontribusi Berita Untuk Radio		
X	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Komunikasi	Rp.	1.485.000.000
1	Biaya Operasional BTS Trunking (BHP Frekuensi, Listrik, dan Sewa Lokasi)		
Y	Pembinaan dan Monitoring Kehumasan	Rp.	2.000.000.000
1	Analisa Berita Media Massa dan Monitoring dan Analisa Berita di Media Online dan Media Sosial Secara Real Time		
Z	Pembinaan dan Monitoring Kehumasan	Rp.	11.061.605.000
1	Pembentukan, Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat Provinsi DKI Jakarta		
2	Pengelolaan Sosialisasi Kebijakan Pemprov DKI Jakarta Melalui Media Tercetak dan Media Luar Ruang		
3	Publikasi Pemberdayaan Perempuan		
4	Komunikasi Pembangunan Jakarta		
5	Manajemen Komunikasi Jejaring Kehumasan		
6	Respon Opini Publik		
7	<u>Penelitian dan Pengembangan Data dan Informasi</u> <i>Jakarta Smart City</i>		
8	Pelaksanaan Rekomendasi kegiatan berbasis TIK di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		
AA	Pengelolaan Portal Resmi Pemerintah Daerah	Rp.	13.890.535.500
1	<u>Pengelolaan, Pengembangan Website Resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Penataan Ruang Operasional</u>		
2	<u>Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi Data dan Informasi melalui Peta Digital Enterprise</u>		
3	Pengelolaan dan Pengembangan Website Berita Resmi Pemprov. DKI Jakarta www.beritajakarta.com		
AB	Dukungan Teknis Pengelolaan Sistem Aplikasi	Rp.	2.232.310.000
1	Dukungan Teknis Operasional Pengelolaan SIPKD		
2	Dukungan Teknis Operasionalisasi SIMPEG Pemprov DKI Jakarta		
3	Dukungan Teknis SI Aset		
4	Dukungan Operasional PPID (Pejabat Pengelola Informasi Daerah)		
AC	Penataan dan Pengembangan Sistem Aplikasi	Rp.	15.953.010.000
1	Penataan dan Pengembangan Aplikasi SIPKD		
2	Penataan dan Pengembangan Aplikasi PTSP		
3	Penataan dan Pengembangan Aplikasi e-Absensi dan e-TKD		
4	Pengembangan Sistem Remunerasi Pemprov DKI Jakarta		
5	Pengembangan Sistem E-Kinerja Pendukung Kebijakan Remunerasi		

6	Pengembangan Sistem E-Budgeting		
7	Dukungan Teknis Pengelolaan Electronic Budgeting Provinsi DKI Jakarta		
AD	Penyelenggaraan Event Komunikasi, Informatika dan Kelumasan	Rp.	5.869.371.000
1	<u>Penyelenggaraan Lomba dan Pameran Fotografi Jakarta</u>		
2	Penguatan Pemahaman Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)		
3	Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Terkait TIK		
4	Penghargaan Badan Publik "Transparency Award"		
5	Peringatan Right Know To Day		
6	Fokus Group Discussion (FGD) Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik		
7	Pemilihan Anggota Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta		
AE	Partisipasi Event Komunikasi, Informatika dan Kehumasan	Rp.	7.206.891.930
1	Peran Serta Diskominfo dan Kehumasan pada Pameran:		
2	Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Informasi		
3	Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Informasi Publik Online		
4	Pemasyarakatan UU 14 Tahun 2008 Melalui Media Cetak dan Elektronik		
5	Dukungan Sekretariat Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta		
AF	Penyelenggaraan Komisi Penyiaran dan Informasi Daerah (KPID) Provinsi DKI Jakarta	Rp.	7.150.340.000
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana KPID Pendukung Perizinan dan Pemantauan Siaran		
2	Pengembangan Website KPID Provinsi DKI Jakarta		
3	Forum Pemasyarakatan Penyiaran		
4	Sosialisasi Perizinan dan Isi Siaran di Media Massa		
5	Seminar Penyiaran Digital		
6	Kepesertaan Indonesia Broadcasting Expo 2015		
7	Penyelenggaraan Komisi Penyiaran dan Informasi Daerah (KPID) DKI Jakarta Award		
8	Dukungan Sekretariat Komisi Penyiaran dan Informasi Daerah (KPID) DKI Jakarta		
9	Penataan Ruang Komisi Penyiaran dan Informasi Daerah (KPID) DKI Jakarta		
10	Dukungan Operasional Komisioner Komisi Penyiaran dan Informasi Daerah (KPID) DKI Jakarta		
AG	Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) serta Pelaksanaan e-Procurement Sistem Nasional dan Aplikasi Lainnya	Rp.	1.934.020.000
1	Pengadaan Storage Backup Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)		
2	Pengadaan Touchscreen Informasi Layanan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)		
3	Pengadaan Sistem Antrian Loker di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)		
4	Pelaksanaan e-Procurement Sistem Nasional dan Aplikasi Lainnya		
5	Rapat/ Seminar/ Kemitraan/ Konsultasi Teknis Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)		
6	Pengelolaan Kerumahtanggaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)		

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD)

Kepala Bappeda

selaku Wakil Ketua I TAPD,

Andi Baso M.

NIP 195908051987091001

Kepala Bidang Pemerintahan

selaku Anggota TAPD,

Sahat Parulian

NIP 196306051990111001